



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAHRUL SAEHANA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 874042

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **302.012.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , LAINNYA Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 236 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 999 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 6.006.000
7. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 6.006.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **110.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2012, HADIAH Rp. 6.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	331.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	744.812.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	744.812.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.